

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **2.1 Gambaran Umum Kota Magelang**

##### **2.1.1 Kondisi Geografis Kota Magelang**

Kota Magelang adalah salah satu dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah. Kota Magelang terletak pada posisi 7°26'18"-7°30'9" Lintang Selatan dan 110°12'30"-110°12'52" Bujur Timur. Kota Magelang merupakan wilayah terkecil di Jawa Tengah. Luasnya hanya sekitar 1,68% jika dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten yang mengitarinya yakni Kabupaten Magelang. Sementara itu dilihat dari jarak dengan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang berada pada jarak 75 KM.

Posisi Kota Magelang terletak di tengah-tengah wilayah administratif Kabupaten Magelang dan hampir di tengah-tengah pulau Jawa. Posisi tersebut menjadikan daya tarik geografis alami Kota Magelang karena berada pada persilangan simpul ekonomi, transportasi dan pariwisata antara wilayah Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung.

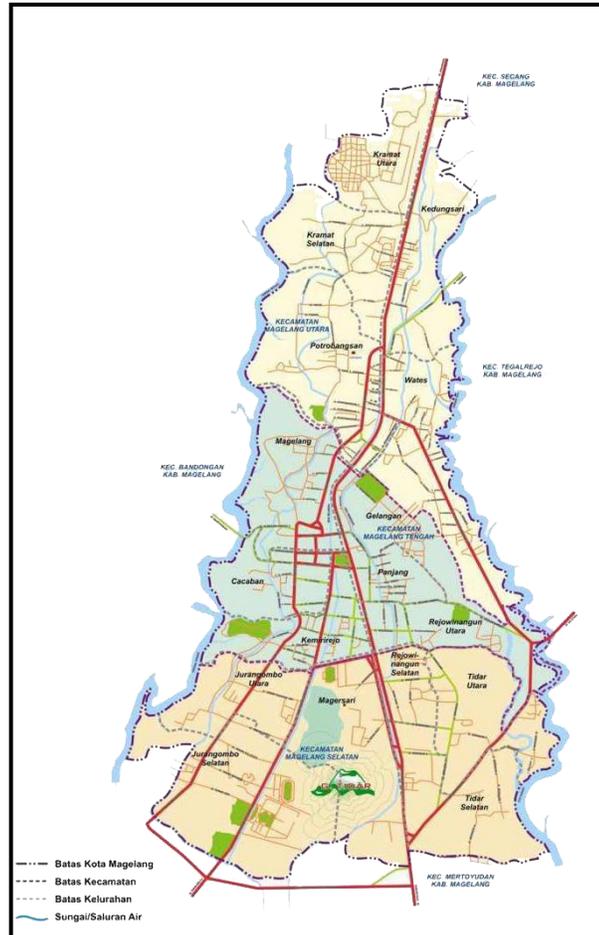
Posisi strategis ini didukung dengan penetapan Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kawasan PURWOMANGGUNG (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung) dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Batas wilayah administratif Kota Magelang adalah sebagai berikut:

- 1) sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
- 2) sebelah timur berbatasan dengan Sungai Elo/Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;
- 3) sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; dan
- 4) sebelah barat berbatasan dengan Sungai Progo/Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

Kota Magelang dengan luas 18,54 km<sup>2</sup> terbagi atas 3 kecamatan, 17 kelurahan, 192 RW dan 1.031 RT. Untuk Kecamatan Magelang Selatan mempunyai luas wilayah 7,13 km<sup>2</sup> yang terbagi atas 6 kelurahan, 70 RW dan 326 RT. Kecamatan Magelang Tengah mempunyai luas wilayah sebesar 5,12 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 6 kelurahan dengan 73 RW dan 399 RT. Sedangkan untuk Kecamatan Magelang Utara dengan luas wilayah 6,29 km<sup>2</sup> terdiri dari 5 kelurahan, 49 RW dan 306 RT.

**Gambar 2. 1**

**Peta Posisi Kota Magelang di Jawa Tengah**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Magelang*

## **2.2 Gambaran Umum SMA Katolik Pendowo Magelang**

SMA Katolik Pendowo merupakan salah satu sekolah tertua di Kota Magelang yang telah berdiri sejak tahun 1951 di bawah Yayasan Pendowo. Dalam perkembangannya, pada tahun 1974 SMA Katolik Pendowo mampu mendirikan sekolah sendiri dengan 27 ruang kelas, di atas tanah 8640 m<sup>2</sup>, di Jalan Perintis

Kemerdekaan 92, Kota Magelang. Sebelum tahun 1988, jumlah siswa rata-rata di atas 1000 orang (27 kelas). Gedung SMA Katolik Pendowo yang sudah berumur 46 tahun berdiri kini telah direnovasi, hingga tampak berdiri dengan megah, lengkap dengan laboratorium fisika, kimia, biologi, dan komputer.

**Gambar 2. 2**  
**SMA Katolik Pendowo Magelang**



**Sumber: *Dokumentasi Penulis***

SMA Katolik Pendowo merupakan salah satu SMA yang menampung siswa penerima beasiswa Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat serta beasiswa dari Kemendikbud lainnya. SMA Katolik Pendowo memiliki asrama untuk menampung siswa yang jauh dari Magelang, dengan biaya per

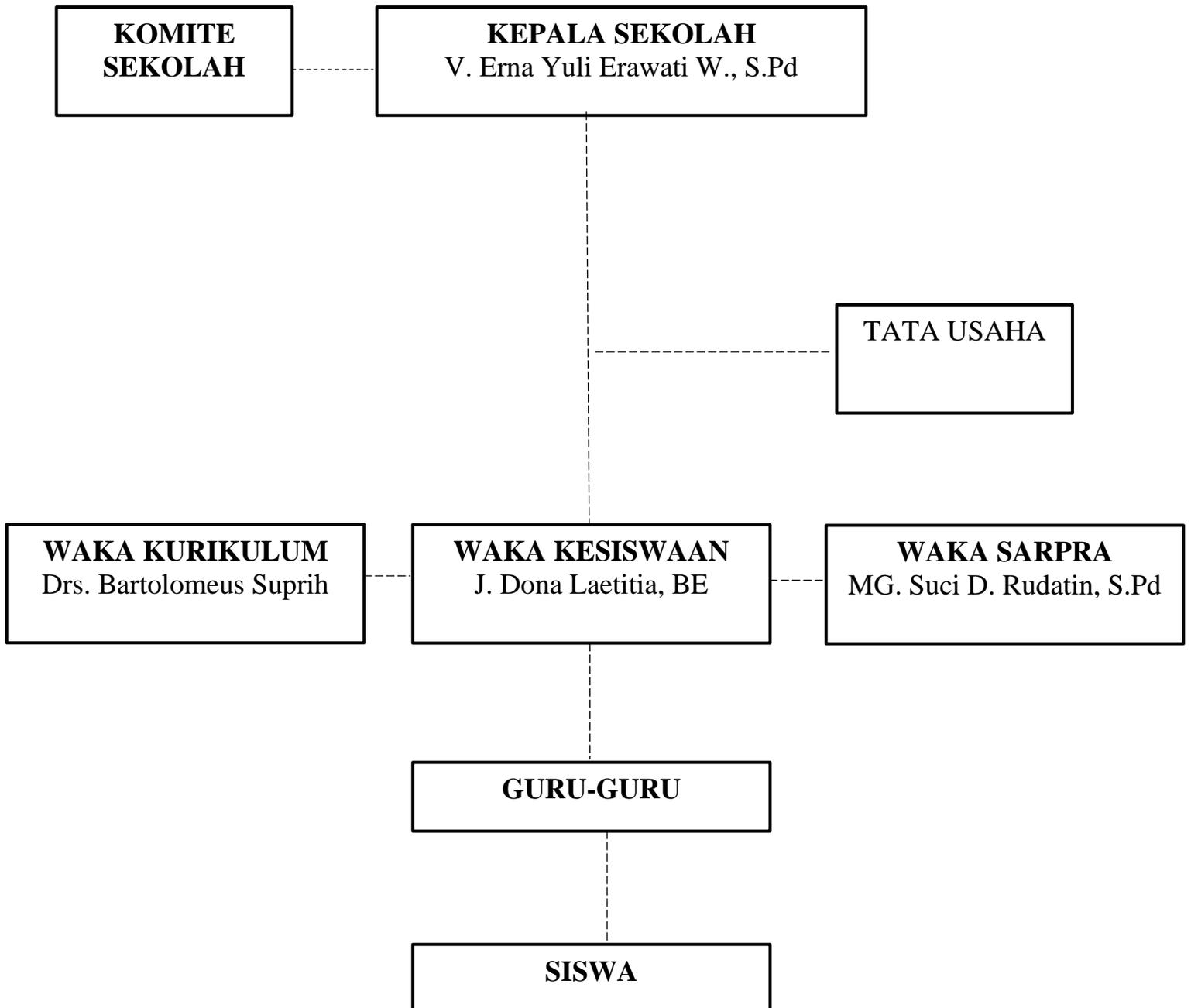
bulan yang terjangkau dan bagi penerima beasiswa Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat serta beasiswa dari Kemendikbud lainnya mendapatkan fasilitas asrama secara gratis yang telah dibayarkan oleh Kementerian Pendidikan.

### **2.3 Visi dan Misi SMA Katolik Pendowo Magelang**

SMA Katolik Pendowo memiliki visi “mutu dalam prestasi, sopan dan berperilaku. Misi SMA Katolik Pendowo yakni meningkatkan mutu, prestasi, etika, perilaku siswa, melestarikan lingkungan hidup, serta mencegah pencemaran atau kerusakan.

## 2.4 Struktur Organisasi SMA Katolik Pendowo Magelang

Gambar 2.3  
Struktur Organisasi SMA Katolik Pendowo Magelang



*Sumber: SMA Katolik Pendowo Magelang*

## **2.5 Program Afimasi Pendidikan Menengah Papua dan Papua Barat**

Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat adalah bentuk pendidikan layanan khusus yaitu dengan mentransfer siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari Provinsi Papua dan Papua Barat ke-6 Provinsi di Indonesia yakni Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Program ADEM Papua dan Papua Barat dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pendidikan layanan khusus kepada putra putri yang berasal dari Papua dan Papua Barat. Penerapan program ADEM di sekolah-sekolah penerima diatur sesuai dengan kekhasan layanannya. Siswa penerima program ADEM yang telah lolos seleksi akan mendapatkan layanan berupa penjemputan dari wilayah asal mereka ke luar wilayah yang telah ditetapkan. Siswa penerima program ADEM akan mendapatkan fasilitas berupa uang saku, tempat tinggal serta perlengkapan belajar dari seragam hingga alat tulis. Selain itu sebagian besar bentuk layanan pendidikan yang diberikan sama dengan peserta didik reguler.

Tujuan dari pelaksanaan program ADEM adalah meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat usia sekolah menengah yang terkendala oleh hambatan geografis dan ekonomi; meningkatkan minat dan motivasi anak sekolah menengah yang

terkendala oleh hambatan geografis dan ekonomi; mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia di provinsi yang memiliki kendala hambatan geografis dan ekonomi dalam hal mengakses pendidikan.

Hasil yang diharapkan dalam program ADEM adalah terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang bermutu melalui implementasi program ADEM; terlaksananya upaya dalam mendukung program Wajib Belajar 12 Tahun melalui implementasi program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM); meningkatnya motivasi belajar siswa yang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah melalui program ADEM; terlaksananya upaya dalam mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia di provinsi yang memiliki kendala hambatan geografis dan ekonomi dalam hal mengakses pendidikan (Widayanti & Jumintono, 2021).

Pelaksanaan program ADEM Papua dan Papua Barat bagi putra-putri di Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan dan pemihakan kepada mereka untuk dapat menerima layanan pendidikan menengah yang berkualitas dalam rangka akulturasi keragaman budaya di Indonesia. Dalam rangka percepatan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat Direktorat PMPK, Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud setiap tahunnya melanjutkan program ADEM bagi siswa putra-putri asli Papua sebanyak 500 siswa/i yang ditempatkan di 6 Provinsi meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, serta Jawa

Tengah.

Sosialisasi di Papua dan Papua Barat tentang program Afirmasi Pendidikan Menengah dilaksanakan di Kabupaten dan Kota serta Provinsi pengirim program ADEM, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada sekolah, siswa, pemerintah daerah (Dinas Pendidikan Provinsi) dan masyarakat tentang program ADEM. Tim sosialisasi bertugas untuk membantu pelaksanaan program ADEM di bidang pengelolaan, dan penyebaran informasi dan kehumasan.

Merujuk kepada Panduan Pelaksanaan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat, dalam menentukan peserta program ADEM persyaratan calon penerima bantuan program ADEM Papua dan Papua Barat adalah diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dan tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan surat Keterangan Tidak Mampu (KTM); lulus Ujian Nasional tahun ajaran saat seleksi dari SMP Negeri atau Swasta; usia peserta didik program ADEM minimal 17 tahun dan maksimal 21 tahun per tahun ajaran baru; memiliki motivasi yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah; memiliki prestasi akademik; sehat jasmani dan rohani; lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota; bebas narkoba dan tidak sedang hamil.